



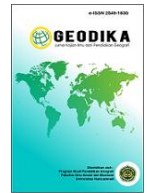
Website: <http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/gdk>



GEODIKA
Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi

Terakreditasi S5 – SK No. 177/E/KPT/2024

Penerbit: Universitas Hamzanwadi



Keputusan Bermukim di Kawasan Rawan Banjir Baleendah: Analisis Persepsi Diri, Risiko, dan Preferensi Bermukim

Naila Rosdiana¹, Salma Suci Ramadhani², Deyra Hasya Raihanah³,
Keisha Sophia Zahra⁴, Shafira Husnaya Zahira⁵.

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

*Email Koresponden: nailarosdiana49@student.upi.edu

Diterima: 31-05-2026, Revisi: 10-09-2026, Disetujui: 30-09-2026

©2026 Universitas Hamzanwadi

Abstrak. Banjir musiman yang terus menerus terjadi di kawasan permukiman Kecamatan Baleendah kerap direspons dengan keengganan masyarakat untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan di balik fenomena tersebut dengan menganalisis persepsi risiko, bentuk adaptasi fisik, serta faktor sosial ekonomi yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk tetap bermukim di kawasan banjir. Dengan menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa warga sebenarnya memiliki kesadaran penuh terhadap tingginya ancaman banjir. Namun, rasa takut ini berhasil diredam karena warga merasa mampu beradaptasi, seperti dengan meninggikan lantai rumah dan membangun rumah bertingkat sebagai tempat evakuasi mandiri. Selain itu, alasan utama warga enggan direlokasi adalah kuatnya rasa kekeluargaan antartetangga, serta efisiensi biaya hidup dan kedekatan rumah dengan sumber mata pencaharian. Di sisi lain, ada juga sekelompok warga yang terpaksa bertahan akibat tidak memiliki biaya untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Dapat disimpulkan bahwa keputusan warga Kecamatan Baleendah untuk tidak pindah adalah bentuk rasionalitas terbatas, mereka bersedia menoleransi kerugian fisik demi mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi sehari-hari.

Kata kunci: adaptasi fisik, imobilitas paksa, keputusan bermukim, persepsi risiko, rasionalitas terbatas

Abstract. The recurring seasonal flooding in residential areas of Baleendah Subdistrict is often met with residents' reluctance to relocate to safer areas. This study aims to identify the reasons behind this phenomenon by analyzing risk perceptions, forms of physical adaptation, and socioeconomic factors that influence the community's decision to remain in flood-prone areas. Using qualitative methods, data were collected through in-depth interviews and field observations. The findings reveal that residents are fully aware of the high flood risk. However, this fear is mitigated because residents feel capable of adapting, such as by raising their home floors and building multi-story homes as self-evacuation shelters. Additionally, the primary reasons residents are reluctant to relocate include strong neighborhood bonds, cost-effectiveness of living, and the proximity of their homes to sources of livelihood. On the other hand, there is also a group of residents who are forced to stay because they lack the funds to move to a safer location. It can be concluded that the decision by residents of Baleendah Subdistrict not to relocate is a form of bounded rationality; they are willing to tolerate physical losses in order to maintain their daily social and economic stability.

Keywords: physical adaptation, forced immobility, settlement decisions, risk perception, bounded rationality

PENDAHULUAN

Banjir merupakan bencana hidrometeorologi global yang secara konsisten menimbulkan kerusakan luas pada kawasan permukiman rentan di sepanjang bantaran sungai (Indrasari & Rudiarto, 2020). Peningkatan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim global semakin meningkatkan frekuensi genangan sehingga banyak wilayah dataran banjir dinilai berisiko sangat tinggi bagi ruang hunian (Faisal et al., 2021). Laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi realitas tersebut di tingkat daerah melalui rilis kebencanaan. Rilis tersebut mencatat sedikitnya empat kecamatan di Kabupaten Bandung secara masif terdampak oleh luapan banjir yang merendam

permukiman warga, salah satunya Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (BNPB, 2021). Secara empiris, intensitas ancaman fisik ini terus meningkat setiap tahunnya sehingga memicu kerugian materiil dan nonmateriil yang signifikan bagi masyarakat luas. Meskipun bahaya lingkungan berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, dinamika di lapangan justru menunjukkan suatu paradoks spasial dan psikologis yang sangat kompleks dalam manajemen kebencanaan. Banyak kelompok masyarakat di zona berisiko tinggi secara sadar memutuskan bertahan alih-alih mengevakuasi diri atau melakukan rekolasi permanen ke tempat yang lebih aman. Ketidakseimbangan respons ini secara berkelanjutan mengakibatkan kerugian sosial ekonomi bagi warga yang memilih mempertahankan ruang hidup mereka di tengah ancaman bencana.

Fenomena kontradiktif mengenai keberterahan masyarakat teramati secara nyata di kawasan permukiman periurban Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung (Pratomo et al., 2021). Data BNPB secara spesifik menunjukkan bahwa luapan air sungai ini merendam wilayah Kelurahan Andir dan Kelurahan Baleendah dengan Tinggi Muka Air (TMA) mencapai 100 cm (BNPB, 2021). Banjir tersebut menggenangi 10.572 unit rumah tinggal, 28 fasilitas pendidikan, serta 46 tempat ibadah hingga melumpuhkan aktivitas vital 33.252 jiwa penduduk (BNPB, 2021). Sebagai wilayah cekungan geomorfologis yang padat, kawasan ini secara rutin menghadapi ancaman genangan ekstrem dengan tinggi muka air yang kerap menghambat mobilitas utama masyarakat. Kondisi infrastruktur jalan dan drainase setempat belum mampu menampung beban limpasan secara optimal (Rafdi & Kusumah, 2023). Kerentanan berulang ini pada akhirnya mendorong masyarakat setempat mengembangkan berbagai strategi adaptasi lokal guna meredam dampak paparan bahaya (Wati & Kurnia, 2019). Modifikasi arsitektur hunian secara mandiri diaplikasikan sebagai mekanisme keberterahan fisik warga melalui peninggian lantai dasar dan pembuatan struktur bertingkat. Strategi fisik ini akhirnya menormalisasi risiko banjir dan memperkuat keyakinan warga bahwa ancaman tersebut dapat disiasati tanpa meninggalkan ruang hidup mereka.

Kompleksitas keberterahan warga di zona bahaya Kecamatan Baleendah meningkat saat kelangsungan hidup berbenturan langsung dengan akar masalah sosial ekonomi. Berdasarkan data statistik kewilayahan, kepadatan penduduk dan jumlah bangunan hunian yang berada di kawasan rawan masih menunjukkan angka signifikan (BPS Kabupaten Bandung, 2023). Keberterahan warga di bantaran sungai didukung oleh adaptasi fisik hunian serta modal sosial berupa kekerabatan erat dan gotong royong (Ikhsan et al., 2022). Kedekatan tempat tinggal dengan pusat mata pencaharian menjadi alasan rasional dari dimensi ekonomi yang menghambat relokasi mereka. Pertimbangan finansial tersebut memaksa warga menoleransi dampak sosial ekonomi akibat genangan berkala demi mempertahankan stabilitas pendapatan utama (Sahadah & Arif, 2024). Sementara itu, masyarakat yang berpenghasilan rendah terjebak dalam kondisi kerentanan berlapis karena keterbatasan kapital finansial untuk mengakses hunian baru yang lebih aman.

Langkah penguraian paradoks perilaku bermukim dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan makrospasial dan mikropsikologis melalui tiga teori yang berinteraksi secara terstruktur. Teori pertama adalah preferensi bermukim yang bertindak sebagai kerangka makrospasial untuk menjelaskan evaluasi individu terhadap kualitas dan nilai kegunaan ruang hidup berdasarkan faktor keberterahan lokal (Fortona, 2025). Teori kedua adalah persepsi risiko yang merepresentasikan dimensi mikropsikologis berupa penilaian kognitif subjektif warga terhadap tingkat keparahan bencana banjir di lingkungannya (Lailissa'adah & Malem, 2023). Teori ketiga adalah persepsi diri yang berfokus pada evaluasi internal individu mengenai kapasitas, efikasi, dan ketahanan diri dalam memitigasi bahaya secara mandiri. Pertautan antara penilaian risiko eksternal dan keyakinan kapasitas diri internal menghasilkan sintesis akhir yang menentukan keputusan warga untuk bertahan atau berpindah.

Urgensi teoretis untuk mengkaji aspek psikologi dan perilaku masyarakat didasarkan pada kenyataan bahwa pendekatan struktural pemerintah saja belum cukup menyelesaikan masalah banjir secara permanen. Evaluasi kritis terhadap respons pemerintah menunjukkan bahwa intervensi penanggulangan banjir struktural sering kali kurang responsif dan belum menyentuh akar kebutuhan sosial masyarakat setempat (Rizqiani et al., 2025). Kebijakan mitigasi konvensional menjadi tidak efektif karena hanya memandang relokasi sebagai solusi spasial linear tanpa menyediakan instrumen mitigasi terhadap potensi kehancuran jaringan ekonomi warga. Kegagalan manajemen masa lalu menegaskan

perlunya reformasi tata kelola kebencanaan demi merumuskan tindakan mitigasi yang efektif dan berkelanjutan (Pazos et al., 2022). Akibat hilangnya modal sosial dan lapangan kerja di lokasi yang baru, banyak warga yang telah direlokasi memutuskan untuk kembali mendiami bantaran sungai yang rawan bencana. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap batasan kognitif warga dalam merespons risiko menjadi prasyarat mutlak sebelum merumuskan instrumen kebijakan kebencanaan yang baru.

Meskipun kajian mengenai kebencanaan telah banyak dilakukan, literatur terdahulu masih menunjukkan bias sektoral yang memisahkan dimensi fisik lingkungan dan respons perilaku warga. Sebagian besar penelitian konvensional lebih menitikberatkan aspek spasial objektif, seperti penilaian daerah rawan menggunakan proses hierarki analitik dan pemetaan kerentanan fisik eksternal (Seejata et al., 2018; Pratomo et al., 2021). Di sisi lain, literatur yang mengkaji teknologi mitigasi atau respons adaptasi bangunan sering kali luput mengintegrasikan aspek persepsi tersebut sangat bergantung pada konteks lingkungan dan kebijakan spesifik (Spence et al., 2021). Analisis terhadap keputusan bermukim dalam studi sosiologi bencana juga cenderung mengasumsikan masyarakat sebagai aktor rasional murni sehingga mengabaikan interaksi dinamis antara persepsi risiko individu dan tindakan mitigasi nyata mereka (Meldrum et al., 2019). Ketidakseimbangan fokus inilah yang menciptakan stagnasi konseptual dan menyisakan perdebatan yang belum tuntas dalam literatur manajemen bencana kontemporer.

Kesenjangan analitis (*research gap*) mendasari urgensi strategis untuk menjembatani evaluasi spasial objektif dengan pendekatan mikropsikologis melalui metode penelitian yang terstruktur. Guna menangkap realitas subjektif tersebut secara utuh, metode kualitatif diterapkan untuk mengeksplorasi fenomena keberterapan di lapangan secara mendalam (Sugiyono, 2016). Kebaruan utama dihadirkan melalui elaborasi pilar konseptual spasial dan kognitif sebagai dasar dekonstruksi terhadap fenomena keengganan relokasi sebagai bentuk rasionalitas terbatas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan di balik fenomena banjir dengan menganalisis persepsi risiko, bentuk adaptasi fisik, serta faktor sosial ekonomi yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk tetap bermukim di kawasan banjir. Batasan rasionalitas yang diterapkan warga dalam menoleransi risiko banjir harian akan dievaluasi secara menyeluruh guna mengisi kekosongan dari literatur terdahulu. Melalui kejelasan metodologi dan analisis kesenjangan yang tajam, motif mendasar di balik paradoks keputusan bermukim masyarakat di zona bahaya ekstrem dapat diungkap secara tuntas.

Secara teoretis, kontribusi penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah literatur multidisiplin geografi perilaku dan sosiologi bencana. Hasil analisis penelitian diharapkan dapat memberikan penguatan kembali pada aplikasi konsep rasionalitas terbatas secara lebih tajam dan kontekstual dalam studi kerentanan permukiman modern. Secara praktis, implikasi dari temuan riset ini diarahkan untuk menyediakan landasan empiris yang sangat fundamental bagi para pembuat kebijakan mitigasi dan perencanaan wilayah di tingkat lokal. Pemahaman utuh terhadap kompromi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat merupakan kunci utama dalam perancangan program penataan kawasan yang efektif. Temuan ini dapat dijadikan acuan strategis bagi pemerintah dalam perumusan skema mitigasi nonstruktural dan program relokasi yang jauh lebih humanis serta inklusif. Melalui pendekatan yang akomodatif terhadap preferensi lokal, rumusan kebijakan publik di masa depan diharapkan lebih responsif, adaptif, dan minim penolakan dari masyarakat sasaran.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif untuk membedah kompleksitas interaksi antara persepsi diri, persepsi risiko, dan keputusan bermukim masyarakat di kawasan rawan bencana. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) di Kelurahan Andir dan Kelurahan Baleendah, Kabupaten Bandung. Secara geografis, kawasan studi memiliki karakteristik morfologi menyerupai "mangkuk" dataran rendah di hulu Sungai Citarum sehingga menjadi titik akumulasi luapan banjir musiman paling kronis di Bandung Selatan (Pratomo et al., 2021; Wati & Kurnia, 2019). Meskipun terus terpapar banjir selama puluhan tahun dengan genangan hingga hitungan minggu, desakan urbanisasi di wilayah ini justru berbanding lurus dengan tingginya kepadatan penduduk (BPS Kabupaten Bandung, 2023).

Fokus penelitian dioperasionalkan ke dalam tiga dimensi konseptual dari sintesis literatur sebagai kerangka kerja awal (*a priori framework*). Dimensi pertama adalah persepsi diri (*self-perception*)

melalui indikator rekaman pengalaman masa lalu, kapasitas adaptif mandiri, dan identitas lingkungan (Spence et al., 2021). Dimensi kedua adalah persepsi risiko (*risk perception*) yang menjangkau penilaian subjektif warga terhadap kondisi ancaman luapan, tingkat kerentanan hunian, dan eskalasi kecemasan (Pazos et al., 2022). Dimensi ketiga adalah preferensi bermukim melalui variabel keterikatan tempat (*place attachment*), rasionalitas ekonomi, serta ikatan sosial-historis (Meldrum et al., 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur dan observasi lapangan secara langsung. Wawancara melibatkan informan hasil *purposive sampling* dengan kriteria warga asli atau menetap lebih dari 10 tahun, mengalami langsung paparan banjir kronis secara berulang dan mampu mengartikulasikan pengalamannya (Sugiyono, 2016). Sementara itu, observasi lapangan dilakukan secara sistematis pada aspek fisik untuk mendokumentasikan modifikasi arsitektur hunian, jejak batas air (*watermarks*), ketinggian lantai, serta ketersediaan perangkat evakuasi mandiri. Kedua instrumen ini diterapkan guna memenuhi standar triangulasi teknik dengan mengonfrontasikan hasil wawancara langsung terhadap catatan lapangan (*field notes*) dan dokumentasi fisik (Sugiyono, 2016). Seluruh data tekstual hasil rekaman wawancara yang ditranskrip secara *verbatim* dikelola bersama catatan lapangan melalui analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016). Tahapan pertama adalah reduksi data, pengodean (*coding*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan, dan verifikasi berupa pengujian keabsahan pola menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Melalui integrasi ini, data wawancara mengenai persepsi subjektif warga divalidasi langsung oleh temuan fisik objektif hasil observasi lapangan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Keputusan warga untuk terus tinggal di wilayah rawan banjir menggambarkan interaksi kompleks antara manusia dan lingkungan yang berbahaya. Di Kecamatan Baleendah, Bandung, masyarakat menunjukkan kewaspadaan lewat modifikasi fisik rumah mereka serta menormalisasi fenomena banjir yang sering terjadi. Beberapa dari mereka akhirnya memilih untuk bertahan di lokasi banjir karena berbagai faktor. Faktor tersebut sering kali menjebak mereka dalam menentukan sebuah pilihan antara keselamatan atau keberlangsungan hidup sehari-hari. Penting untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan dilematis tersebut.

Tabel 1. Faktor Utama Keputusan Bermukim

No	Faktor Utama Keputusan Bermukim	Temuan Lapangan (data wawancara)	Kecenderungan Jawaban
1	Status Kepemilikan Aset	Rumah yang mereka huni adalah milik pribadi.	Tinggi
2	Keterbatasan Ekonomi	Masyarakat akan pindah jika ekonomi nya berada di kelas atas.	Sangat Tinggi
3	Ketergantungan Mata Pencarian	Masyarakat memanfaatkan Baleendah sebagai tempat usaha, sedangkan sebagian lainnya bermata pencarian di luar Baleendah.	Sedang
4	Normalisasi & Adaptasi Risiko	Masyarakat sudah terbiasa dan bisa mengantisipasi fenomena banjir.	Tinggi
5	Kenyamanan Sosial	Lingkungan sosial dianggap nyaman karena kuatnya solidaritas antar warga sehingga sulit ditinggalkan.	Tinggi

Sumber: Data Wawancara Peneliti, 2026

Tabel 1 memperlihatkan bahwa salah satu penyebab utama keputusan bertahan adalah keterbatasan ekonomi dengan kategori sangat tinggi. Hal ini secara langsung menghambat keinginan masyarakat untuk pindah tempat tinggal. Keputusan masyarakat untuk tetap bermukim di kawasan tersebut dipengaruhi oleh tingginya kepemilikan aset hunian, kapasitas adaptasi terhadap risiko lingkungan, serta kuatnya ikatan sosial antarwarga. Sementara itu, ketergantungan terhadap mata

pencapaian berada dalam kategori sedang. Secara empiris keberlanjutan permukiman di kawasan ini tidak sepenuhnya merepresentasikan pilihan rasional yang bebas, tetapi mencerminkan hambatan struktural yang beriringan dengan kuatnya solidaritas serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan.

Konstruksi Persepsi Risiko dan Kapasitas Adaptasi Fisik

Hasil analisis data wawancara menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Baleendah memiliki persepsi risiko yang tinggi terhadap ancaman banjir di permukiman mereka (*dread risk*). Berdasarkan penuturan warga, luapan air sering kali masuk ke dalam rumah hingga setinggi mata kaki dan merusak peralatan rumah tangga. Selain itu, warga memiliki pengalaman traumatis pada tahun 2020 ketika terjangan banjir yang cukup kuat mampu merobohkan struktur fisik bangunan. Meskipun berhadapan dengan ancaman fisik yang nyata, temuan penelitian memperlihatkan rendahnya tingkat kepanikan di kalangan warga. Kondisi ini didorong oleh pemahaman masyarakat yang sangat baik terhadap pola luapan air. Hal ini tecermin dari penuturan warga bahwa karakteristik banjir dari luapan Sungai Citarum cenderung datang secara bertahap sehingga mereka memiliki waktu untuk bersiap. Warga mengungkapkan bahwa kenaikan air di wilayah tersebut terjadi perlahan-lahan dan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga akhirnya menggenangi kawasan tersebut. Pernyataan tersebut merepresentasikan tingginya pemahaman risiko masyarakat terhadap situasi bencana. Alih-alih meresponsnya sebagai ancaman yang mengejutkan (*unknown risk*), warga mengurangi rasa takut tersebut karena mereka menyadari bahwa kedatangan banjir yang bertahap memberikan jeda waktu yang cukup bagi mereka untuk bersiap.

Keputusan warga untuk bertahan di wilayah rawan bencana ini didorong oleh persepsi mengenai nilai penting dan arti strategis dari tempat tinggal mereka. Alih-alih merasa terancam, masyarakat justru menemukan ketenangan, bahkan merasa kian dekat dengan nilai-nilai spiritual. Warga mengatakan bahwa mereka telah berada pada tahap ikhlas dan merasakan kenyamanan yang mendalam. Mereka menilai bahwa keutamaan hidup dan ketenangan di tempat tersebut jauh lebih berharga dibandingkan dengan rasa takut terhadap banjir. Makna “nyaman” dalam konteks ini telah menggeser persepsi risiko banjir menjadi faktor sekunder dalam pertimbangan bermukim. Hal tersebut diperkuat oleh adanya faktor kesukarelaan (*voluntariness*). Warga merasa memiliki ikatan kuat karena tempat tinggal mereka merupakan warisan keluarga atau hasil jerih payah sendiri. Masyarakat menilai keterikatan emosional dan kepemilikan atas aset tersebut mengesampingkan kekhawatiran akan risiko bencana. Dengan demikian, kepasrahan warga diartikan sebagai bentuk pilihan rasional. Mereka lebih memilih menoleransi gangguan banjir berkala demi menjaga stabilitas sosial dan kenyamanan tempat tinggal yang telah mereka bangun selama puluhan tahun.

Persepsi masyarakat mengenai kemampuan beradaptasi terhadap banjir tahunan tecermin melalui modifikasi fisik pada hunian mereka. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar warga secara aktif merespons risiko genangan dengan meningkatkan ketinggian lantai dasar rumah. Penguatan struktur hunian melalui peninggian lantai yang mencapai setengah meter dilakukan untuk menghalau air masuk ke dalam rumah. Selain modifikasi pada ketinggian lantai, strategi adaptasi spasial lain yang marak ditemukan di Kecamatan Baleendah adalah penambahan struktur bangunan vertikal hingga dua atau tiga lantai. Ruang pada lantai atas ini difungsikan secara spesifik sebagai titik evakuasi mandiri berdasarkan penuturan warga. Keberadaan area tersebut sebagai tempat mengamankan harta benda saat debit air sungai meningkat sehingga warga tidak perlu sepenuhnya meninggalkan kediaman mereka. Upaya mitigasi struktural pada skala mikro ini tidak hanya diterapkan pada hunian pribadi, tetapi meluas ke fasilitas ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari inisiatif para pelaku usaha yang memasang papan pembatas air di depan pintu masuk toko. Pemasangan barikade sederhana ini secara sengaja difungsikan untuk menahan laju limpasan air dari jalan raya agar tidak merembes masuk dan merusak area komersial. Berbagai tindakan modifikasi fisik tersebut memberikan landasan rasionalitas (*reasoning*) bahwa tingginya ancaman bahaya di wilayah ini diimbangi dengan tingginya efikasi diri (*self-efficacy*). Investasi fisik yang dikeluarkan warga merepresentasikan wujud kemandirian tata ruang, mereka secara mandiri merekayasa kerentanan menjadi sebuah mekanisme pertahanan agar tetap dapat menjalankan kehidupan normal di tengah ancaman.



Gambar 1. Pembatas air di depan toko
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026)

Temuan mengenai masifnya modifikasi fisik hunian sebagai respons terhadap banjir di Baleendah ini sejalan dengan konsep keberlanjutan (*resilience*) masyarakat di wilayah rawan bencana. Menurut Indrasari dan Rudiarto (2020), kemampuan keberlanjutan masyarakat tidak hanya diukur dari ketangguhan menghadapi bencana, tetapi juga dari dorongan untuk menyerap gangguan serta melakukan pemulihan mandiri guna tetap melangsungkan kehidupan di lokasi yang sama. Investasi material berupa peninggian lantai dan pembangunan rumah vertikal yang dilakukan warga membuktikan bahwa mereka sedang mempraktekkan strategi hidup berdampingan dengan banjir (*living with floods*). Fenomena ini mengonfirmasi penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa durasi tinggal yang lama dan keterikatan tempat yang kuat mendorong individu untuk melakukan negosiasi risiko melalui perkuatan struktur bangunan daripada memilih untuk melakukan relokasi (Indrasari & Rudiarto, 2020). Dengan demikian, praktik adaptasi fisik di Kecamatan Baleendah mempertegas bahwa konstruksi bangunan bukan sekadar perlindungan mekanis, melainkan manifestasi dari resiliensi psikologis dan material masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan.



Gambar 2. Peninggian bangunan
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026)

Keterikatan Sosial dan Rasionalitas Ekonomi

Keterikatan terhadap lingkungan tempat tinggal di wilayah rawan banjir Kecamatan Baleendah secara signifikan dipengaruhi oleh tingginya tingkat solidaritas sosial dan hubungan antartetangga yang sangat erat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat berperan sebagai bantalan sosial yang mengurangi beban psikologis dan fisik saat bencana terjadi. Warga menginformasikan mekanisme saling bantu yang intensif, mulai dari peringatan dini saat debit air sungai meningkat, hingga dukungan untuk evakuasi mandiri menggunakan perahu saat melewati area yang terendam. Dukungan sosial ini menjadi alasan mendasar yang mengurangi minat masyarakat untuk berpindah ke lokasi lain, narasumber mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tetap bertahan saat banjir dan tidak memiliki keinginan untuk pindah karena tetangganya saling membantu. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan sosial yang suportif menciptakan rasa aman. Oleh karena itu, keberadaan komunitas yang

solid dianggap lebih bernilai dibandingkan dengan risiko lingkungan yang harus dihadapi setiap tahunnya.

Rasionalitas ekonomi menjadi dasar penting yang memperkuat keputusan masyarakat untuk tetap bermukim di wilayah terdampak banjir selain faktor sosial. Analisis terhadap data lapangan mengindikasikan bahwa efisiensi biaya hidup di Kecamatan Baleendah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan seperti Kota Bandung, terutama karena harga kebutuhan pokok di pasar lokal yang masih terjangkau oleh kemampuan finansial warga. Selain itu, terdapat ketergantungan ekonomi yang sangat kuat terhadap lokasi (*location-based livelihood*). Banyak warga yang mengintegrasikan tempat tinggal dengan mata pencaharian mereka baik dengan membuka usaha warung rumahan maupun dengan menjaga kedekatan lokasi hunian dengan pasar dan tempat kerja. Temuan ini didukung oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa para pedagang tetap menjalankan kegiatan ekonomi mereka meskipun berada di area yang berisiko tinggi. Mereka memilih untuk menoleransi ancaman banjir berkala demi menjaga stabilitas pendapatan harian. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan bermukim di Baleendah merupakan hasil pertimbangan ekonomi yang realistis. Bagi warga, keuntungan finansial dari rendahnya biaya hidup dan kemudahan akses terhadap sumber pendapatan dianggap lebih penting daripada beban biaya relokasi yang tinggi ke wilayah baru yang belum tentu memberikan kepastian ekonomi yang serupa.



Gambar 3. Integrasi tempat tinggal dan mata pencaharian
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026)

Faktor ekonomi dan keterikatan sosial menjadi alasan kuat untuk bertahan. Namun, hasil penelitian menyoroti sebuah pengecualian penting bahwa keputusan untuk menetap tidak selalu mencerminkan kesukarelaan (*voluntariness*) warga sepenuhnya. Sebagian warga secara eksplisit menyatakan keinginan untuk pindah apabila memiliki kemampuan finansial yang memadai. Bagi mereka, pengalaman menghadapi banjir yang merusak struktur bangunan dan menghambat mobilitas kerja menjadi pemicu utama munculnya niat untuk relokasi. Hal ini diperkuat oleh keterangan narasumber yang menegaskan bahwa keberadaan dana yang cukup menjadi faktor penentu utama untuk pindah, demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Bagi warga tersebut, kepindahan menjadi mendesak karena bencana banjir selama ini tidak hanya merusak tempat tinggal, tetapi juga mempersulit mereka dalam mencari nafkah. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi saat ini dimaknai sebagai “kompromi paksa” akibat keterbatasan ekonomi. Keinginan untuk menghindari kerugian fisik dan kemacetan panjang di Kecamatan Baleendah terhalang oleh kurangnya dana untuk mencari lokasi baru yang lebih aman, tetapi tetap terjangkau. Dengan demikian, fenomena bertahan di wilayah rawan banjir ini perlu dilihat dari dua sudut pandang, bagi sebagian warga menetap di sana adalah pilihan atas kenyamanan, tetapi bagi yang lain itu menjadi bentuk ketidakberdayaan ekonomi yang membelenggu cita-cita mereka untuk hidup di lingkungan yang lebih layak.

Perbandingan antara aspek ekonomi dan risiko dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai guna ekonomi dan keterjangkauan biaya hidup sering kali menjadi faktor yang lebih dominan daripada persepsi bahaya dalam menentukan keputusan tetap bermukim. Temuan ini selaras dengan penelitian (Indrasari & Rudiarto, 2020) yang menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terpapar

bencana secara bertahap akan membentuk tingkatan kebertahanan yang berbeda, dengan upaya untuk pulih dan melanjutkan aktivitas ekonomi sebagai hal yang paling utama. Dalam konteks penelitian, variabel ketergantungan lokasi ekonomi dan solidaritas sosial terbukti meminimalkan kekhawatiran terhadap risiko fisik banjir. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan rawan bencana sering kali berada dalam kondisi *involuntary immobility*, sebuah keadaan ketika keinginan untuk berpindah ke lokasi yang lebih aman terhambat oleh keterbatasan modal ekonomi untuk mengakses pasar perumahan yang lebih baik. Dengan demikian, keputusan untuk bertahan di Kecamatan Baleendah bukanlah sebuah bentuk irasionalitas masyarakat, melainkan hasil dari pertimbangan faktor-faktor kehidupan yang menempatkan stabilitas ekonomi dan dukungan komunitas saat ini lebih utama daripada potensi kerugian akibat bencana di masa depan.

Sintesis Keputusan Bermukim (Diskusi Agregat)

Sintesis dari seluruh dimensi penelitian menunjukkan bahwa keputusan masyarakat untuk tetap bermukim di kawasan rawan banjir Kecamatan Baleendah bukanlah ketidaksengajaan yang pasif, melainkan produk kompromi adaptif yang sangat kompleks. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi bahaya (*dread risk*) yang tinggi pada warga dapat ditekan melalui keyakinan terhadap kapasitas diri (*self-efficacy*) yang diwujudkan dalam bentuk modifikasi fisik hunian. Selain itu, dampak psikologis akibat bencana dapat diminimalkan lewat keberadaan jaring pengaman sosial dan kuatnya ikatan kekeluargaan antartetangga. Interaksi antara daya lenting fisik dan sosial kemudian diperkuat oleh rasionalitas ekonomi, yang menempatkan efisiensi biaya hidup dan tingginya ketergantungan mata pencaharian pada lokasi bencana sebagai jangkar penahan utama mobilitas warga. Akumulasi dari persilangan faktor kognitif, fisik, sosial, dan finansial pada akhirnya menciptakan titik ekuilibrium preferensi bermukim. Artinya, secara kolektif masyarakat menilai bahwa nilai guna ruang, ikatan emosional historis, dan stabilitas ekonomi harian yang ditawarkan oleh kawasan ini mampu mengompensasi atau bahkan melampaui beban kerugian material akibat banjir musiman.

Implikasi teoretis dari fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan masyarakat untuk bertahan di wilayah rawan banjir Baleendah bukanlah bentuk irasionalitas, melainkan wujud dari konsep rasionalitas terbatas (*bounded rationality*). Dalam teori pengambilan keputusan, individu sering kali tidak mencari solusi yang paling optimal secara objektif, melainkan memilih opsi yang cukup memuaskan (*satisficing*) berdasarkan batasan informasi, waktu, dan kapasitas ekonomi yang dimiliki. Bagi warga Baleendah, pilihan untuk tetap tinggal menjadi sangat rasional karena risiko banjir yang sifatnya periodik dianggap lebih mudah dikelola (melalui adaptasi fisik dan bantuan sosial) daripada risiko ekonomi yang bersifat eksistensial jika mereka harus pindah ke lokasi baru. Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam manajemen risiko bencana, pemerintah tidak dapat hanya menggunakan pendekatan teknokratis yang memaksa relokasi tanpa mempertimbangkan “logika bertahan” warga. Temuan ini menegaskan bahwa setiap keputusan bermukim di daerah berisiko selalu melibatkan negosiasi antara kerugian yang dapat ditoleransi (*tolerable loss*) dan keuntungan sosial ekonomi yang sulit digantikan di tempat lain.

Hasil penelitian ini mengimplikasikan pentingnya perubahan arah dalam kebijakan pengelolaan bencana, dari pendekatan relokasi yang bersifat terpusat (*top-down*) menuju penguatan kemampuan beradaptasi di tempat (*in-situ adaptation*). Temuan mengenai kuatnya ikatan sosial dan rasionalitas ekonomi di Baleendah sejalan dengan pandangan (Pazos et al., 2022) yang menekankan bahwa efektivitas manajemen risiko sangat bergantung pada sejauh mana intervensi kebijakan selaras dengan persepsi ancaman dan realitas keseharian masyarakat lokal. Kebijakan mitigasi yang mengabaikan nilai guna ekonomi dan kohesi sosial warga cenderung menghadapi resistensi karena masyarakat mempertimbangkan bahwa opsi relokasi yang ditawarkan justru lebih mengancam stabilitas kehidupan mereka dibandingkan bencana banjir itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperhatikan aspek sosial, seperti persepsi risiko, keputusan bermukim, dan kapasitas adaptasi masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan risiko banjir yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada efektivitas infrastruktur hijau, seperti ruang terbuka hijau, sumur resapan, dan sistem drainase berkelanjutan dalam mengurangi risiko banjir perkotaan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keputusan masyarakat Kecamatan Baleendah terkait keberlanjutan permukiman di kawasan rawan banjir disimpulkan sebagai kompromi rasional yang didasarkan pada kapasitas adaptasi mandiri. Kapasitas adaptasi tersebut diwujudkan melalui modifikasi fisik bangunan, seperti peninggian struktur lantai dan pembangunan rumah bertingkat. Hal tersebut juga didukung oleh solidaritas antartetangga, efisiensi biaya, kemudahan akses tempat kerja, serta kuatnya ikatan sosial budaya. Sebagai implikasi dari temuan riset, pendekatan relokasi sentralistik (*top-down*) tidak dapat lagi dijadikan landasan tunggal penanganan bencana ke depan. Bagi upaya pencapaian pembangunan wilayah berkelanjutan, penyediaan infrastruktur mitigasi skala besar perlu diseimbangkan dengan dukungan terhadap strategi adaptasi di tempat (*in-situ adaptation*). Melalui keseimbangan ini, dampak bencana dapat diminimalkan secara optimal tanpa disertai hilangnya komunitas sosial dan sumber penghidupan warga. Sebagai rekomendasi, agenda penelitian lanjutan perlu diarahkan pada eksplorasi dampak psikologis jangka panjang akibat adaptasi persisten terhadap siklus banjir tahunan. Fokus khusus diberikan pada stres lingkungan dan kesehatan mental guna pengisian kekosongan literatur kebencanaan yang didominasi oleh aspek kerugian fisik semata.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2021). *Empat Kecamatan Warga Kabupaten Bandung Terdampak Banjir*. Diakses pada 31 Mei 2026, dari <https://www.bnpb.go.id/index.php/berita/Empat%20Kecamatan%20warga%20Kabupaten%20Bandung%20Terdampak%20Banjir>
- BPS Kabupaten Bandung. (2023). *Kecamatan Baleendah Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.
- Faisal, M., Saha, M. K., Sattar, M. A., Biswas, A. K. M. A. A., & Hossain, M. A. (2021). Evaluation of climate induced hazards risk for coastal Bangladesh: A participatory approach-based assessment. *Natural Hazards*, 108(3), 2991–3017.
- Fortona, N. (2025). Analisis Faktor Kebertahanan Bermukim Masyarakat di Kawasan Rawan Banjir (Studi Kasus: Kelurahan Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing). *Reka Ruang*, 8(1), 42–52.
- Ikhsan, W. M. N., Darwis, R. S., & Zainuddin, M. (2022). Modal Sosial dalam Pengelolaan Bantaran Sungai Citarum Sektor 7 Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.40707>
- Indrasari, M., & Rudiarto, I. (2020). Kemampuan Kebertahanan Masyarakat pada Permukiman Rawan Banjir di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(2), 116–129. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.2.116-129>
- Lailissa'adah, & Malem, Z. Z. (2023). Kajian persepsi masyarakat terhadap bencana banjir berdasarkan tingkat kerentanan di Kota Langsa. *Jurnal Geograflesia : Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 8(2), 26–234. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/georafflesia>
- Meldrum, J. R., Brenkert-Smith, H., Champ, P., Gomez, J., Falk, L., & Barth, C. (2019). Interactions between resident risk perceptions and wildfire risk mitigation: Evidence from simultaneous equations modeling. *Fire*, 2(3), 46.
- Pazos, T., Álvarez-Figueiró, P., Cortés-Vázquez, J. A., Jácome, M. A., & Servia, M. J. (2022). Of fears and budgets: Strategies of control in Vespa velutina invasion and lessons for best management practices. *Journal of Environmental Management*, 311, 114856. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114856>
- Pratomo, A., Rustiadi, E., & Pravitasari, A. E. (2021). Penilaian Kerentanan Banjir di Wilayah Peri-Urban: Studi Kasus Kabupaten Bandung. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 13(1), 25–36.
- Rafdi, M. A., & Kusumah, D. O. S. (2023). Peran Infrastruktur Jalan dan Drainase dalam Upaya Adaptasi dan Mitigasi Bencana Banjir Terkait Konsep *Climate Resilient Infrastructure* Studi Kasus:

Kecamatan Baleendah. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 402.
<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3020>

- Rizqiani, A. P., Meisya, R., Khoeriah, S., & Septiadi, M. A. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Respon Pemerintah Dalam Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Baleendah. *Jendela Kota: Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota*, 2(2), 77–90.
<https://doi.org/10.33751/jekota.v2i2.108>
- Sahadah, N. S., & Arif, M. (2024). Analisis Dampak Banjir Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Samudera Geografi*, 7(1), 39–44.
- Seejata, K., Yodying, A., Wongthadam, T., Mahavik, N., & Tantanee, S. (2018). Assessment of flood hazard areas using analytical hierarchy process over the lower Yom Basin, Sukhothai Province. *Procedia Engineering*, 212, 340–347. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.044>
- Spence, A., Leygue, C., Wickes, L., Withers, L., Goulden, M., & Wardman, J. K. (2021). Dumber energy at home please: Perceptions of smart energy technologies are dependent on home, workplace, or policy context in the United Kingdom. *Energy Research & Social Science*, 72, 101873.
<https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101873>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Re&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wati, S. R., & Kurnia, A. (2019). Strategi Adaptasi Masyarakat terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. *Jurnal Geografi Geodesi*, 8(4), 112–125.